

PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PELAKU UMKM ATAS STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM)

Qimyatussa'adah¹, Sasmito W. Nugroho², Halleina R. P. Hartono³

^{1,2,3} *Program Studi D-III Komputerisasi Akuntansi Politeknik Negeri Madiun*

Korespondensi email: qsaadahhafidz@pnm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahaun dan pemahaman para pelaku UMKM di Kota Madiun tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Penelitian ini menggunakan metode survey dengan sejumlah pertanyaan sederhana tentang SAK EMKM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 90% dari 112 responden belum memahami dan mengimplementasikan SAK EMKM pada laporan keuangannya. Oleh karenanya, sosialisasi dan pelatihan yang berkesinambungan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa informasi seputar penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dapat diketahui oleh para pelaku UMKM secara menyeluruh.

Kata kunci: *UMKM, SAK EMKM, pengetahuan, pemahaman*

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES FOR THE FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTITIES

Abstract

This study aims to determine the extent of knowledge and understanding of the MSMEs in Madiun City about the Financial Accounting Standards of Micro, Small and Medium Entities (FAS MSME). This study uses a survey method with a number of simple questions about SAK EMKM. The results of this study indicate that 90% of the 112 respondents did not understand and implement FAS MSME in their financial statements. Therefore, continuous socialization and training needs to be carried out to ensure that information about the preparation of financial statements based on FAS MSME can be known to the overall MSMEs.

Keywords: *MSME, FAS MSME, knowledge, understanding*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah menunjukkan perannya dalam perekonomian Indonesia. Peran UMKM dapat dilihat dari jumlah UMKM yang mendominasi jenis usaha yang dilakukan di Indonesia dengan persentase mencapai 98,68%¹ serta, nilai peredaran usaha nasional yang mencapai Rp. 8.573.895,4 milyar pada tahun 2018². Selain itu, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah mencapai 116. 978.631 orang³. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM

adalah salah satu penopang dan penggerak perekonomian negara.

UMKM memiliki potensi untuk terus berkembang dalam hal jumlah peredaran usaha dan penyerapan tenaga kerja. Potensi perkembangan nilai peredaran usaha UMKM juga merupakan potensi penerimaan pajak untuk penyelenggaraan negara. Sadar akan hal ini, maka pemerintah mendukung Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) untuk menyusun Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

Gagasan untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan, pada dasarnya telah diwujudkan dalam penetapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP disusun dengan mengadopsi *International Financial Reporting Standar for Small and Medium Enterprise* (IFRS for SME) yang diterbitkan pada 1 Januari 2009. Namun demikian, dalam implementasinya penggunaan SAK ETAP tidak sesuai untuk entitas bisnis yang berskala mikro dan kecil. Oleh karenanya, SAK EMKM disusun sesuai dengan kebutuhan dan skala aktivitas bisnis pelaku UMKM.

Penerapan SAK EMKM diharapkan dapat memudahkan pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangannya. SAK EMKM dapat digunakan oleh para pelaku UMKM sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangannya. Dengan menyusun laporan keuangan, para pelaku UMKM dapat mengetahui kinerja keuangan aktivitas bisnis yang dilakukannya. Laporan keuangan yang disusun sesuai SAK EMKM akan menghasilkan laporan keuangan yang berisikan informasi yang akurat, mudah dipahami, relevan dan dapat dibandingkan dengan entitas lain yang sejenis. Sehingga pelaku UMKM dapat mengembangkan aktivitas bisnisnya dengan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Manfaat lain yang dapat diperoleh para pelaku UMKM dalam menerapkan SAK EMKM pada penyusunan laporan keuangannya adalah kemudahan untuk memperoleh dana dalam pengembangan bisnisnya dari pihak kreditur. Dengan penyajian laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM, pelaku UMKM dapat meyakinkan pihak kreditur dengan lebih baik berdasarkan informasi yang tersedia pada laporan keuangannya. Pihak kreditur akan lebih

mudah memberikan penilaian atas kelayakan pendanaan yang diajukan oleh pelaku UMKM.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui seberapa baik pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang SAK EMKM sejak penerapannya, seperti Febriyanti & Wardhani (2018) yang melakukan penelitian di kota Surabaya yang menunjukkan hasil bahwa jika pelaku UMKM memiliki persepsi SAK EMKM cukup penting sebagai alat akuntabilitas usaha maka pelaku UMKM akan menerapkan SAK EMKM, tetapi apabila pelaku usaha memiliki persepsi bahwa SAK EMKM tidak berpengaruh banyak terhadap usahanya maka pelaku usaha tersebut tidak akan menerapkan SAK EMKM.

Penelitian yang dilakukan di Tangerang Selatan menunjukkan bahwa persepsi pemilik ataupun pengelola UMKM menganggap pentingnya pemahaman tentang SAK EMKM. Namun demikian, 80,4% (mayoritas) UMKM di Kota Tangerang Selatan belum melakukan penerapan SAK EMKM pada laporan keuangannya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh pemilik ataupun pengelola UMKM di Kota Tangerang Selatan dalam mencatat laporan keuangan (Putra, 2018). Penelitian sejenis yang dilakukan di Pekanbaru menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM di Kota Pekanbaru masih pada tingkat cukup. Pemahaman pada tingkat cukup ini, terutama pemahaman tentang konsep asumsi dasar yaitu konsep akrual basis dan konsep entitas bisnis serta konsep penyajian laporan keuangan yaitu informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk konsep pengukuran biaya historis, asumsi kelangsungan usaha dan

komponen laporan keuangan, Pelaku UMKM memiliki pemahaman yang tinggi (Salmiah et al., 2018).

Selain di Tangerang dan Pekanbaru, penelitian serupa juga dilakukan di Kota Batam yang menunjukkan bahwa persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK EMKM, sosialisasi SAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK EMKM dan persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan sosialisasi SAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK EMKM (Janrosl, 2018). Semetara di Kabupaten Banyumas, hasil penelitian menunjukkan bahwa cukup setuju dengan penerapan SAK EMKM terhadap laporan keuangan.. Selain itu, pelaku usaha cukup setuju dengan penggunaan informasi akuntansi terhadap laporan keuangan (Purwati, Suparlinah, & Putri, 2018).

Hasil penelitian di Kecamatan Malalayang, Manado menunjukkan bahwa tidak ada satu pun UMKM yang menyusun laporan keuangan dikarenakan tidak mengertinya cara penyusunan laporan keuangan dan tidak adanya keinginan dari pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM yang ada (Rawun & Tumilaar, 2019). Sementara, penelitian yang dilakukan di Kecamatan Buleleng menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan ukuran usaha mempengaruhi pemahaman para pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM (Suastini, et al 2019).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik pengetahuan para pelaku UMKM di Kota Madiun setelah penerapan SAK EMKM yang efektif per 1 Januari 2018. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan gambaran bagi para pemangku kebijakan di wilayah Kota Madiun untuk menerapkan kebijakan baru dan program-program lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pelaku UMKM dalam pengelolaan aktivitas bisnisnya, khususnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

METODE PENELITIAN

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman para pelaku UMKM tentang SAK EMKM guna menjadi umpan balik bagi para pemangku kebijakan dalam menentukan agenda dan program lanjutan. Maka, penelitian ini jika dilihat berdasarkan tujuannya adalah penelitian terapan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan suatu permasalahan untuk dapat merumuskan sebuah kebijakan.

Domain penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman akan SAK EMKM. Pengetahuan yang ingin diketahui pada penelitian ini, secara sederhana diartikan sebagai pengetahuan atau berbagai informasi tentang SAK EMKM yang telah diperoleh pelaku UMKM. Sementara pemahaman diartikan sebagai kemampuan pelaku UMKM untuk mengimplementasikan pengetahuannya tentang SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangannya.

Desain penelitian ini adalah penelitian survei, yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan sederhana berkaitan dengan pengetahuann dan pemahaman pelaku UMKM tentang SAK EMKM. Adapun, populasi pada penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Madiun yaitu 191.880. Responden yang terlibat pada penelitian ini

adalah 112 pelaku UMKM.

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan merekapitulasi jawaban-jawaban responden atas pertanyaan tertutup. Kemudian melakukan perhitungan persentasi atas jawaban responden, sehingga dapat diketahui persentasi atas masing-masing pilihan jawaban. Untuk pertanyaan terbuka, jawaban-jawaban yang serupa dikelompokkan menjadi satu.

Hasil rekapitulasi, perhitungan persentasi dan pengelompokkan jawaban terbuka kemudian digunakan untuk mengetahui jawaban mayoritas yang menjadi pilihan responden. Selain itu, informasi yang diperoleh dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan kemungkinan alternatif solusi yang dapat diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang diisi oleh responden pada penelitian ini berjumlah 112 kuesioner. Data demografi responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia lebih dari 40 tahun yaitu 58 %. Sementara responden yang berusia kurang dari 20, 20an dan 30an berturut-turut adalah 2%, 20% dan 0%. Sebanyak 65% responden memiliki tingkat Pendidikan antara Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, 14% pendidikan Diploma, 20% berpendidikan Sarjana dan 1% berpendidikan pasca sarjana.

Lebih dari 80% responden menyatakan bahwa tidak memiliki tenaga khusus yang memahami administrasi dan keuangan. Meskipun demikian, lebih dari 60 % responden telah melakukan pencatatan atas penerimaan dan penggunaan dana dalam aktivitas bisnisnya masing-masing. Pencatatan masih dilakukan secara sederhana, karena lebih dari 85% responden tidak memahami siklus akuntansi. Hal ini juga berdampak pada kemampuan responden untuk menyusun laporan keuangan

dimana lebih dari 85% responden mengakui belum pernah menyusun laporan keuangan atas aktivitas bisnisnya masing-masing.

Pelaku UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini juga belum memahami definisi dari UMKM dan kriteria yang mendasari sebuah entitas sebagai UMKM, hal ini ditunjukkan dengan 50% responden yang menjawab tidak tahu apa itu UMKM. Sejalan dengan hal ini, lebih dari 90% responden tidak tahu apa yang dimaksud dengan SAK EMKM. Dan hanya sekitar 15% responden yang pernah mendapatkan sosialisasi tentang SAK EMKM. Sehingga mayoritas responden 60% responden tidak mengetahui apa saja komponen-komponen dari laporan posisi keuangan yang meliputi aset, liabilitas dan ekuitas.

Terbitnya SAK EMKM memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan diakui oleh 45% responden. Namun dalam implementasinya, hanya 2% responden yang telah menerapkan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangannya.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik atas kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, wawancara tidak terstruktur dilakukan kepada lima responden. Isi wawancara meliputi pertanyaan seputar hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Responden memberikan jawaban bahwa kurangnya pemahaman atas uraian yang tertuang dalam SAK EMKM dan kurangnya contoh nyata dari penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan EMKM.

Pelaku UMKM yang diwawancarai juga menyatakan bahwa sebenarnya mereka menyadari manfaat dari penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Namun pelaku UMKM tersebut belum menerapkannya karena tanggapan belum

mendesak untuk dilakukan. Beberapa pelaku UMKM ini menyatakan berniat untuk menyusun laporan keuangan ketika membutuhkan tambahan modal dengan mengajukan kredit pada pihak bank.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM di wilayah Madiun tentang SAK EMKM. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari responden yang telah memahami SAK EMKM, sehingga sebagian besar dari responden tidak menerapkan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangannya bahkan belum pernah menyusun laporan.

Keterbatasan sumber daya menjadi halangan bagi peneliti untuk mengambil sampel yang lebih besar dari populasi UMKM yang ada di Kota Madiun. Oleh karenanya, hasil dari penelitian ini tidak dapat digunakan untuk menggambarkan pengetahuan dan pemahaman UMKM secara keseluruhan. Namun demikian, dengan adanya jawaban responden, dapat membantu memberikan informasi bahwa masih ada pelaku UMKM yang belum mengetahui atau belum menerima sosialisasi tentang SAK EMKM.

5.2 Saran

Koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah perlu dilakukan dengan lebih baik, sehingga pelaku UMKM mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM, sehingga baik pelaku UMKM, pemerintah dan pihak lainnya mendapat manfaat atas informasi yang disediakan dalam laporan keuangan UMKM.

Sosialisasi dan pelatihan penyusunan

laporan keuangan dengan menggunakan SAK EMKM harus dilakukan secara berkesinambungan. Sehingga, pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan SAK EMKM pada penyusunan laporan keuangan dapat diketahui secara menyeluruh oleh pelaku UMKM di Kota Madiun.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode lain untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM atas SAK EMKM. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah responden yang terlibat dalam penelitian sehingga dapat mewakili pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada seluruh rekan-rekan (yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu) yang telah memberikan dukungannya pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriyanti, G. A., & Wardhani, A. S. (2018). Pengaruh Persepsi, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Terhadap Penerapan SAK EMKM Pada UMKM Wilayah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah ESAI Volume*, 12(2), 112–127.
- Janrosl, V. S. E. (2018). Analisis Persepsi Pelaku UMKM dan Sosialisasi SAK EMKM terhadap Diberlakukannya Laporan Keuangan yang Berbasis SAK EMKM. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 11(1), 97–105.
- Purwati, A. S., Suparlinah, I., & Putri, N. K. (2018). Analisis Pemahaman Literasi Pelaku UMKM Atas Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) di Kabupaten Banyumas. In *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII" 14-15 November*

- 2018 *Purwokerto* (pp. 73–81). Purwokerto.
- Putra, Y. M. (2018). Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM pada UMKM di Kota Tangerang Selatan. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(2), 201–217.
- Rawun, Y., & Tumilaar, O. N. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM (Suatu Studi UMKM Pesisir Di Kecamatan Malalayang Manado). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisni*, 12(1), 57–66.
- Salmiah, N., Nanda, S. T., Adino, I., Akuntansi, P. S., Kuning, U. L., & Riau, P. (2018). Pemahaman Pelaku UMKM terhadap SAK EMKM: Survey Pada Umkm Yang Terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 2(2), 194–204.
- Suastini, K. E., Dewi, P. E. D. M., & Yasa, I. N. P. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Ukuran Usaha Terhadap Pemahaman Umkm Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus Pada UMKM di Kecamatan Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(1).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.